



## **KATA PENGANTAR**

Bismillahirrohmaanirrohiim

Assalaamualaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT,atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya serta Shalawat dan salam selalu disampaikan bagi junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam LKj-IP merupakan wujud pertanggungjawaban para pemangku jabatan pemerintahan kepada masyarakat dalam kurun waktu 1 tahun anggaran. Adapun maksud dan tujuan disusunnya LKj-IP yaitu untuk menggambarkan penerapan Rencana strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dimasing-masing perangkat daerah sehingga keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja pada tahun yang akan datang. LKj-IP akan menunjukkan hasil jika capaian yang dihasilkan telah selaras dan bersinergi dengan apa yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Oleh karena itu SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang dimulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP).



Untuk pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi, dan misi Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu **“TERWUJUDNYA SIDENRENG RAPPANG YANG MAJU DAN TERKEMUKA BERSAMA MASYARAKAT RELIGIUS DENGAN PENDAPATAN MENINGKAT DUA KALI LIPAT”**

yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2014-2018 dimana Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dibuat secara periodik sebagai perwujudan tanggungjawab pelaporan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi instansi dalam rangka terselenggaranya good governance yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan demikian pemerintah daerah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang berusaha untuk melaporkan dan menyajikan data pencapaian pembangunan selama tahun 2015 dalam bentuk dokumen Laporan Kinerja Instansi



Pemerintah (LKj IP). Kami menyadari LKj IP ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga besar harapan kiranya dapat dikaji dan ditelaah serta memberikan masukan pada kami Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan pembangunan dimasa yang akan datang. Kepada pihak-pihak yang telah turut serta dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada kita sekalian. Demikian semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Wassalaamualaikum Wr.Wb.

Pangkajene Sidenreng, Agustus 2016

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**



**H. RUSDI MASSE**



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam era globalisasi komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan Clean Government semakin kuat. Hal tersebut sesuai dengan harapan stake holders Pemerintah, Pelaku Bisnis, masyarakat International dan termasuk rakyat pada umumnya terhadap penyelenggaraan Pemerintah yang efisien, professional, transparan, akuntabel dan bebas KKN. Tuntutan tersebut telah diakomodasikan dalam ketetapan MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Instansi Pemerintah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan serta untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk mencapai misi Organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 – 2018 merupakan pedoman dalam pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang selama tahun 2009-2013 dengan Visi **“TERWUJUDNYA SIDENRENG RAPPANG YANG MAJU DAN TERKEMUKA BERSAMA MASYARAKAT RELIGIUS**



***DENGAN PENDAPATAN MENINGKAT DUA KALI LIPAT”***, dengan 6 (enam) misi yaitu :

1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian terpadu, modern dan berkelanjutan;
2. Mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi dan keunggulan local melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan UMKM;
3. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang ebrdaya saing tinggi berdasarkan keimanan dan ketaqwaan;
4. Pengembangan infrastruktur bernilai tambah tinggi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, dan memperlancar aksesibilitas antar wilayah;
5. Memantapkan iklim kehidupan social kemasyarakatan yang kondusif;
6. Mewujudkan percepatanreformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum., dan pengembangan kebijakan yang progender, pro poor, pro job dan pro environment.

Penyusunan LKj IP Kabupaten Sidenreng Rappang disusun dengan mengacu pada arahan kebijakan dan program pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 – 2018yang telah ditetapkan melalui PERDA No. 6 Tahun 2014 serta



mengacu pada pelaksanaan prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

Dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 – 2018 telah ditetapkan kebijakan umum pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan penjabaran dari strategi dan arah kebijakan dalam upaya merealisasikan misi dan mewujudkan visi. Sebagai penjabaran dari poin-poin visi, misi, strategi dan arah kebijakan tersebut, maka kebijakan umum ini merupakan kumpulan upaya untuk mewujudkan citra kabupaten sebagai pusat agribisnis modern dan lima terbaik di Sulawesi Selatan dalam pembangunan manusia. Kebijakan umum pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang dijabarkan dalam lima poin kebijakan yang saling terkait dan bersinegri satu sama lain yaitu :

1. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Agribisnis Argoindustri;
2. Memantapkan Peningkatan Kualitas Manusia;
3. Membangun dan Mengembangkan Sarana dan Prasarana Daerah;
4. Memelihara Iklim Kondusif dalam Kehidupan Masyarakat;
5. Mengefektifkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance).



Adapun hasil pengukuran capaian sasaran pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Tahun Anggaran 2015 mencapai 115,33 % dari sasaran yang direncanakan, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Produksi padi meningkat sampai 5% pertahun	Ton	509	536,012	<b>105.31%</b>
2.	Produktivitas Padi	Ku/Ha	59,24	64,23	<b>108.42%</b>
3.	Produksi jagung meningkat 2% pertahun	Ton	41,600	58,634	<b>141%</b>
4.	Produktivitas jagung	Ku/Ha	40,05	54,12	<b>135.13%</b>
5.	Produksi kedelai meningkat 1% pertahun	Ton	607	181	<b>0.29%</b>
6..	Populasi Sapi	Ekor	54.944	54.950	<b>100,01%</b>
7.	Populasi Kambing	Ekor	2.850	2.853	<b>100,11%</b>
8.	Populasi ayam pedaging	Ekor	2.912.039	1.714.855	<b>58,89%</b>
9.	Populasi Ayam Buras	Ekor	1.835.856	2.757.386	<b>150,20%</b>
10.	Populasi Ayam Ras petelur	Ekor	4.540.498	5.889.408	<b>129,71%</b>
11.	Populasi Itik	Ekor	9.359.949	10.432.777	<b>100,04%</b>
12.	Produksi daging sapi	Kg	719.190	1.091.672	<b>151,79%</b>
13.	Kontribusi sector peternakan terhadap PDRB	Rp	681.396.880.000	710.129.555.0000	<b>151,79%</b>
14.	Konsumsi/kapita/tahun	Kg	2,59	3,93	<b>151,74%</b>
15.	Produksi perikanan budidaya	Ton	696,96	641,44	<b>92,03%</b>
16.	Produksi perikanan tangkap	Ton	3.076,7	2.320,4	<b>75,42%</b>
17.	Konsumsi ikan	Ton	41,94	40,30	<b>96,09%</b>
18.	Jumlah ikan yang ditebar	ekor	3.345.000	922.000	<b>27,56%</b>
19.	Panjang jalan tani terbangun	meter	31.000	62.100	<b>200.32%</b>
20.	Cakupan fasilitasi perumusan kebijakan	%	70	70	<b>100%</b>



No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
21.	Terlaksananya penanaman /reboisasi pada kawasan hutan seluas 1.300 Ha	Ha	0.801%	0.801%	<b>100%</b>
22.	Cakupan pelayanan jaringan irigasi tersier tingkat usaha tani	Ha	12.369	23.000	<b>185,94%</b>
23.	Cakupan koordinasi perumusan kebijakan lingkungan hidup	%	100	100	<b>100%</b>
24.	Cakupan perlindungan konsumen	Produk	6.788	6.983	<b>102%</b>
25.	Cakupan jumlah IKM aktif dan produktif	%	35	36,80	<b>104,89%</b>
26.	Persentase koperasi aktif dari jumlah Koperasi	%	49,5	49,16	<b>99,31%</b>
27.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	27%	27%	<b>100%</b>
28.	Sistem informasi PM & promosi	%	70	70	<b>100%</b>
29.	Koordinasi, perumusan kebijakan, pelaporan dan pembinaan BUD	%	75	75	<b>100%</b>
30.	Persentase kepuasan pasien	%	78	92	<b>108%</b>
31.	Persentase pasien rawat inap	%	77	77	<b>100%</b>
32.	Jumlah kunjungan RITL	pasien	6.993	10.103	<b>133%</b>
33.	Jumlah kunjungan RJTL	pasien	23.816	40.011	<b>168%</b>
34.	Persentase tenaga yang mendapat pelatihan minimal 20 jam (SPM RS)	%	30	1,6	<b>5%</b>
35.	Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan	%	83	77,22	<b>93%</b>
36.	Pelayanan kesehatan dasar dan pengembangan puskesmas	%	15	45	<b>300%</b>
37.	Pemantauan Status Gizi	%	4%	8%	<b>200%</b>
38.	Terpeliharanya kesehatan anak	%	24,8	76	<b>306%</b>
39.	Persentase penduduk yg menggunakan air minum sehat	%	4.8	4.8	<b>100%</b>





No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
40.	terjaminnya keamanan makanan	%	95	95	<b>100%</b>
41.	Penurunan Total Fertility Rate (TFR) Kab.Sidrap dari 2,44 ke 2,6 di tahun 2018	TFR	2,40	2,36	<b>98,33%</b>
42.	Presentase Jumlah pengunjung perpustakaan	%	1.200	900	<b>80%</b>
43.	Guru berkwalifikasi S1/D.IV di semua jenjang pendidikan	%	90%	91%	<b>101%</b>
44.	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perkuliahan yang berkualitas dan memadai serta kualifikasi/kwalitas tenaga pendidik (Dosen) dan kependidikan yang berkompetensi	%	65%	81%	<b>125%</b>
45.	Sarana dan prasarana olahraga	Lapangan	5	9	<b>180%</b>
46.	Kesejahteraan Imam, Petugas Syara, Guru TPA, Muballigh,Tassbeh dan KIPRA	%	40	40	<b>100%</b>
47.	Terciptanya Kerukunan Umat Beragama	keg	1	1	<b>100%</b>
48.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	80.33	80.33	<b>100%</b>
49.	Terbangunnya Talud untuk memperkuat Infrastruktur jalan	%	30.94	30.94	<b>100%</b>
50.	Terpeliharanya Jalan Dan Jembatan	%	9.20	9.20	<b>100%</b>
51.	Terbangunnya Infrastruktur Jalan di wilayah Strategis Khususnya di Perdesaan	%	30.49	30.49	<b>100%</b>
52.	Persentase KIM dan internet keliling	%	72	72	<b>100%</b>
53.	Peningkatan penanganan kasus kebakaran	%	89	89	<b>100%</b>
54.	Rumah tangga ber Sanitasi	Desa/kel	5 desa/kel	8	<b>120%</b>
55.	Persentase peningkatan Ruang Terbuka Hijau	%	20%	10%	<b>50%</b>



No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
56.	Terpeliharanya Taman dalam kab. Sidrap	Lokasi	8	8	100%
57.	Rasio jaringan irigasi	%	3,45	3,45%	100%
58.	Cakupan luas layanan areal irigasi yang dialiri	Ha	12.240	12.240	100%
59.	Cakupan Penanganan kedaruratan dan logistik	%	80.01	80.01	100%
60.	Cakupan Rehabilitasi dan rekonstruksi	%	0.35	0.35	100%
61.	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	Pol PP	200	159	79.5%
62.	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 yang tertangani	%	60	55	92%
63.	Persentase kejadian gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang tertangani	%	60	55	92%
64.	Persentase SKPD yang telah melaksanakan system dan prosedur ketatalaksanaan dengan jelas, efektif, efisien dan terukur.	%	100	100	100%
65.	Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Meningkatkan Dari 60% Menjadi 100%	%	20	20	100%
	Peningkatan Kualitas laporan keuangan SKPD sesuai SAP	%	6%	6%	100%
66.	Status Pelayanan Kabupaten Pelayanan terhadap anak (Kabupaten Layak Anak)	%	AKB=27, AKI=3, Sekolah ramah anak=7%, Taman bermain anak= 30%	AKB=27, AKI=3, Sekolah ramah anak=7%, Taman bermain anak= 30%	100%
67.	Persentase Kelompok Masyarakat yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya oleh LPM/LKMD	%	100%	100%	100%
68.	Tertib pembentukan dan implementasi peraturan perundang-undangan	%	98,36	98,36	100%



No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
69.	Persentase penyelesaian kasus/penyidikan pelanggaran Perda dan peraturan bupati	%	75	67	<b>89%</b>
70.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan, Rasio KDRT = 0,01	%	70%	70%	<b>100%</b>
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran %</b>				<b>115,33</b>	

Untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Sidenreng di masa mendatang diperlukan langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan dengan memperhatikan karakteristik dan potensi sumber daya yang ada;
2. Meningkatkan koordinasi dalam pengelolaan sumber daya dan dekonsentrasi;
3. Meningkatkan profesionalisme pengelola kegiatan, baik secara internal maupun eksternal;
4. Meningkatkan upaya-upaya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan;
5. Penyediaan data dan informasi kegiatan yang cukup dalam rangka penyempurnaan penetapan dan pengukuran kinerja.

